

**STUDI ANALISIS TERHADAP ISTIDLAL FATWA DSN-MUI
NOMOR: 41/DSN-MUI/III/2004 TENTANG OBLIGASI
SYARI'AH IJAROH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**



Disusun oleh :

SULISTYOWATI SAPUTRO
2103079

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M

JlPelem Gedong No.6 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Nur Fatoni, M.Ag

Gondang rt/rw.02/04 Cepiring Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Sulistyowati Saputro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sulistyowati Saputro

NIM : 2103079

Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang
Obligasi Syari'ah Ijarah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 150 207 762

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO
FEKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sulistyowati Saputro
NIM. : 2103079
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah
Nasional Majelis Ulama Indonesia No.41/DSN-
MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade / baik / cukup, pada tanggal 31 Juli 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 11 Agustus

2008

Ketua Sidang

Sekretaris

H. Khoirul Anwar, M.Ag., S.Ag.
M.M.
NIP. 150 276 114

Drs. H. Hasyim Syarbani,
NIP. 150 207 762

Penguji I

Penguji II

Moh. Arifin, M.Hum.
NIP. 150 279 720

Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 150 289 379

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 150 207 762

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

ABSTRAK

Salah satu elemen penting dalam mengembangkan ekonomi syari'ah adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan ini mempunyai peranan strategis dalam mengawal perkembangan ekonomi syari'ah agar tidak menyimpang dari khithahnya.

DSN-MUI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah mengeluarkan fatwa.-fatwa tentang transaksi dan produk-produk lembaga keuangan syari'ah. Dalam fatwa-fatwanya tersebut DSN-MUI selalu mengemukakan dalil-dalil syari'ah, baik berupa nash Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun dalil-dalil ra'yu seperti ijma', qiyas, kaidah-kaidah fiqh, dan sebagainya.

Dalam Majma' al-Fiqh al-Islami di Jeddah telah mengeluarkan ketetapan dalam muktamarnya yang keenam tentang haramnya bertransaksi dengan obligasi apapun macam dan bentuknya. Timbul beberapa pertanyaan sekitar hukum syar'i mengenai bertransaksi dengan surat berharga baik menjual maupun membeli sebagian ahli fiqh berpendapat tentang halalnya sebagian surat berharga tersebut dan mengharamkan yang lain. Sebagian ulama yang lain mengharamkan semuanya dan sebagian lagi menghalalkan semuanya.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini berusaha mengkritisi ketepatan penerapan dalil-dalil dalam fatwa DSN-MUI melalui metode ushul fiqh baik melalui pendekatan kaidah kebahasaan atau melalui pendekatan maqashid syari'ah.

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Maidah ayat 1, QS. al-baqoroh ayat 233 dan QS. Al-Qashash ayat 26, dalam fatwa ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi obligasi syari'ah ijarah. Tetapi berisi prinsip-prinsip atau etika-etika yang harus ditegakkan dalam praktek ekonomi syari'ah.

Riwayat-riwayat yang dinukil DSN-MUI dalam menentukan fatwa ini tidak berkaitan langsung dengan obyek fatwa. Tetapi dari matan hadits bisa ditarik pemahaman tentang prinsip-prinsip umum dalam muamalah.

Deklarasi

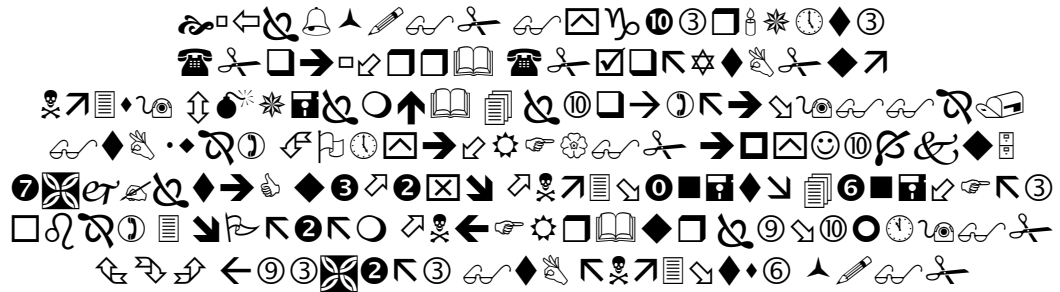
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008

Deklarator

Sulistyowati Saputro

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan :

- ❖ Bapakku Sumardi dan Ibuku Daryati tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untukku dengan tiada hentinya.
- ❖ Adikku Budi tersayang yang selalu memberikan dukungan.
- ❖ Mas joko tercinta makasih selalu menemaniku selama ini dalam suka maupun duka dan dukungannya selama ini.
- ❖ Pakdeku terima kasih telah membiayaiku kuliah selama ini
- ❖ Bude, Om ku, bulekkku, dan keponakan-keponakanku terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untukku selama ini.
- ❖ Fina dan Sofi makasih atas bantuan kalian selama ini dan selalu mendampingi baik duka maupun duka.

Harapan penyusun semoga buah karya yang sederhana ini mampu memberikan motivasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam mengarungi bahtera kehidupan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.41/DSN-MUI /III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari, bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Yth.Prof Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo) yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Yang terhormat Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M. dan bapak Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan guna penyusunan skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu serta adikku tercinta, yang telah membimbing dan memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga menjadi amal yang baik (shaleh) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 14 Juli 2008
Penulis,

Sulistyowati Saputro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ISTIDLAL DAN OBLIGASI	
A. Istidlal	12
1. Al-Qur'an.....	15
Pengertian.....	15
Penjelasan Al-Qur'an Terhadap Hukum	17
2. As Sunnah	22
Pengertian.....	22
Pembagian Sunnah.....	22
3. Ijma'.....	24
Pengertian.....	24
Pembagian Ijma'	24

4. Qiyas	24
Pengertian.....	26
5. Istihsan	28
Pengertian.....	28
Macam-Macam Istihsan	28
6. Maslahah Mursalah	32
Pengertian.....	32
7. 'Urf	33
Pengertian.....	33
Macam-Macam 'Urf	33
8. Istishhab	34
Pengertian.....	34
Macam-Macam Istishhab	34
9. Syari'at Orang yang sebelum kita.....	35
10. Mazhab Sahabat	35
Pandangan Terhadap Fatwa Ulama.....	35
Syarat-Syarat Mufti	37
Kewajiban Mufti	38
Mufti Yang Bertaqlid	38
B. Obligasi	
1. Pengertian Obligasi	39
2. Dasar Hukum Obligasi Syari'ah.....	41
3. Pihak-pihak dalam Transaksi Obligasi.....	44
4. Keuntungan, Resiko dan Konsekuensi Penawaran Obligasi	45

BAB III : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 41/DSN-MUI/III/2004 TENTANG OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

A. Profil Dewan Syari'ah Nasional	53
1. Kedudukan DSN	53
2. Tugas dan Wewenang DSN	55

3. Mekanisme Kerja DSN	56
4. Program dan Pembiayaan DSN.....	59
B. Isi Keputusan DSN-MUI Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah	61

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN DALIL-DALIL SYARI'AH DAN ISTIDLAL DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

A. Analisis penerapan dalil-dalil syari'ah	
1. Analisis Penerapan Dalil Al-Qur'an	65
2. Analisis Penerapan Dalil As-Sunnah.....	68
3. Analisis Penerapan Dalil Ijma'	70
4. Analisis Penerapan Dalil Kaidah Fiqh.....	72
5. Analisis Penerapan Dalil Pendapat Para Ulama	76
B. Analisis Istidlal DSN-MUI.....	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
C. Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan dalam beribu-ibu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong menolong. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebendaannya dalam suatu kelompok. Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.¹

Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, oleh berbagai faktor.² Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan.³ Dan untuk mencegah agar tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan. Maka Allah menurunkan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 31

² S. Wiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gita Karya, 1988, hal. 19

³ Drs. H. Nazar Bakry, *Problematisa Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. 1, hal. 57

aturan-aturan dalam bermuamalah. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

Supaya manusia dapat melakukan atau mewujudkan kebutuhan-kebutuhan mereka maka harus selalu berpegang atau berpedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sebagai penuntun pemilik daya jangkau dan daya atur yang universal, artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dan segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual.⁵

Dari berbagai persoalan yang aktual dan dibicarakan dunia Islam ini adalah Persoalan Investasi. Salah satu instrumen Investasi yang juga dapat di Investasikan yaitu obligasi (bond). Kata "obligasi" berasal dari bahasa Belanda, yakni obligatie, yang dalam bahasa inggrisnya disebut bond. Dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud obligasi adalah pernyataan berutang kepada pemegang dan menyanggupi untuk membayar / mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana yang

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tt., hal. 56

⁵ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 1

disebutkan dalam surat utang itu. Bukti pengakuan utang tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah / negara atau perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Kep. Menkeu No. 755/KMK.011/1982, bahwa obligasi adalah jenis efek, berupa surat pengakuan utang atas peminjaman utang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlahnya serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.⁶

Bentuk Investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagian Investor di Indonesia. Atas dasar itu, Praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk Investasi obligasi berdasar konsep syariah. Adapun konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi Investor. Penghasilan ini berasal dari bagi hasil usaha tersebut. Dalam ekonomi syariah, surat utang (obligasi) lazim disebut dengan sukuk.

Sudah pasti, obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. Secara definisi, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁷

⁶ Try Widiyono, S.H., M.H, Sp.N. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2006, Cet. 1, hal. 249

⁷ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/111/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.

Karena penerbit obligasi (emiten) telah memperoleh pinjaman uang, tentu saja emiten obligasi harus memberikan imbalan kepada para pembeli obligasinya. Tapi, imbalannya bukan berupa bunga karena bunga itu haram dalam hukum Islam. Sebagai gantinya, imbalan yang diberikan bisa berupa pembagian hasil, margin pendapatan (fee) atau sewa.

Kebutuhan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, ada yang mampu langsung untuk mencukupi kebutuhannya dan ada yang tidak, mereka harus pinjam sana - pinjam sini, utang sana utang sini atau bahkan menyewa demi tercukupinya kebutuhan mereka. Tapi sekarang dengan adanya sarana prasarana yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dengan cara menyewa maka banyak masyarakat bahkan para Investor yang melakukannya.

Tapi pada periode tahun 2000, terjadi pengetatan tentang prosedur pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan utangnya mulai melirik obligasi sebagai salah satu alternatif penggalangan dana. Beberapa alasannya diantaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman di bank.

Apalagi setelah adanya atau diterbitkannya obligasi yang berbasis syariah, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan terdapatnya atau terjadi adanya riba di dalamnya. Bagi para Investor akan lebih mudah lagi dalam pengadaan atau pembelian alat-alat produksi dengan perusahaan menerbitkan obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan

Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.⁸

Dalam Majma' al Fiqh al-Islami di Jeddah telah mengeluarkan ketetapan dalam muktamarnya yang ke enam tentang haramnya bertransaksi dengan obligasi apapun macam dan bentuknya.⁹ Timbul beberapa pertanyaan sekitar hukum Syar'i mengenai bertransaksi dengan surat berharga baik menjual maupun membeli sebagian ahli fiqh berpendapat tentang halalnya sebagian surat berharga tersebut dan mengharamkan yang lain. Sebagian ulama' yang lain mengharamkan semuanya dan sebagian lagi menghalalkan semuanya.

Dari latar belakang inilah maka penulis ingin meneliti masalah kebolehan bertransaksi dengan obligasi syariah ijarah yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pemakaian sumber hukum Islam dalam fatwa obligasi syariah ijarah?
2. Bagaimanakah metode istidlal yang dipakai MUI dalam menerapkan fatwa obligasi syariah ijarah?

⁸ *Ibid.*

⁹ Dr. Husein Syahatah, Dr. Athiyyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal Terjemah*, Penerj. A. Syakur, Surabaya: PT. Pustaka Progressif, 2004, hal. 107

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan proposal ini memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai penulis :

1. Untuk mengetahui penerapan pemakaian sumber hukum Islam dalam fatwa obligasi syariah ijarah
2. Untuk mengkritisi penerapan dalil-dalil syari'ah dalam fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah ijarah.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Penulis akan mencoba menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya :

1. Buku yang berjudul Investasi pada pasar modal syariah karangan Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution menjabarkan :

Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (Underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudarabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain.

Penerbitan instrument investasi ini dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuntungan syariah, sukuk bukan instrument utang piutang dengan bunga (Riba) seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan Konvensional, tetapi sebagai instrument investasi.

2. Buku yang berjudul Panduan Investasi obligasi, karangan Sapto Rahardjo menjabarkan :

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan produk investasi yang memberikan kepastian hukum, kehadiran investasi obligasi syariah sangat ditunggu oleh banyak investor di Indonesia. Selama ini investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang dikeluarkan Perusahaan (emiten) sebagai surat berharga jangka panjang. Obligasi ini bersifat utang dengan memberikan tingkat bunga (kupon) kepada investor (pemegang obligasi) pada waktu tertentu, serta melunasi utang pokok pada saat jatuh tempo. Bentuk investasi ini dirasakan belum mampu memenuhi kebutuhan sebagian Investor di Indonesia.

Atas dasar itu, praktisi pasar modal di Indonesia berkeinginan kuat untuk meluncurkan produk investasi obligasi berdasar konsep syariah. Adapun konsep ini mempunyai prinsip memberikan penghasilan bagi investor.

3. Dalam buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karangan Gemala Dewi, S.H, LL. M, et al. menjelaskan :

Apabila melakukan transaksi dengan akad ijarah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain :

- Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkannya untuk

menggunakan manfaat tersebut.

- Obyek ijarah merupakan suatu yang bias disewakan
- Upah/ sewa dalam akad Ijarah harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai.

Dalam skripsi karya Naila Fitriya, tahun 2004, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akibat Kematian Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Analisis Terhadap Pasal 1575 KUH Perdata)", disini dibahas mengenai akibat hukum dari perjanjian sewn menyewa apabila salah satu pihak meninggal menurut pasal 1575 KUH Perdata yaitu tidak membolehkan dibatakannya akad, sedang dalam hukum islam terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha. Dimana kejadian itu memungkinkan dibatakannya akad. Didalam skripsi karya Ahmad Nafis Hunafi, tahun 2006, yang berjudul "Proses Terjadinya Ijma' Menurut Abdul Wahhab Khallaf Dan Proses Penetapan Hukum Komisi Fatwa MUI ",disini dijelaskan tentang proses penetapan hukum komisi fatwa MUI hampir sama dengan proses ijma' Abdul Wahhab Khallaf, tetapi yang membedakan adalah ruang lingkup dan kehujahannya.

Skripsi Inaratul Ulfah, tahun 2006, yang berjudul "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Yang Mengandung Enzim Baabi Untuk Imunisasi Polio", dijelaskan penggunaan Vaksin yang mengandung Enzim Babi untuk Imunisasi Polio adalah boleh, dikarenakan bahwa IPV adalah vaksin polio yang sangat diperlukan terutama bagi mereka yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh,

jika tidak dipenuhi dapat berbahaya bagi penderita maupun yang lainnya, selain itu belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut.

Sedangkan dalam skripsi Nur Ghofur Isma'il, tahun 2004, yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Muhammad Tentang Ayat-ayat Akuntansi Dalam Al-Qur'an", berisi tentang pengambilan dasar akuntansi berdasarkan surat Al-Baqaroh ayat 282.

Dengan demikian berdasarkan telaah pustaka diatas, penulis merasa yakin bahwa belum ada pembahasan yang serupa atau sama dengan judul yang penulis akan teliti.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian tentang hasil deskripsi dari objek-objek yang diamati dengan situasi yang diteliti. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada obyek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut:

1. Library Research

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode *library research* (Penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya

buku-buku majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.¹⁰ Dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹¹

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek daripada data yang diperoleh. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama. dialokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer, penulis ambil dari kitab Al-Qur'an, As-Sunnah dan data-data dalam bentuk fatwa DSN-MUI. Data sekunder adalah data yang kita butuhkan. Data sekunder yang dimaksud buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada. relevansinya dalam kajian penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/ obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹²

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal. 33

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, IKIP Yogyakarta: Rineka Cipta, tt., Edisi IV, hal. 236

¹² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hal. 63.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul "Study Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUIIIII/2004 Tentang obligasi syariah ijarah, disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas dengan judul skripsi ini dengan demikian maka didalamnya memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai tinjauan umum tentang istidlal dan obligasi

BAB III : Menguraikan sekitar sketsa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai tiga hal yaitu sekilas Dewan syariah Nasional, strukturnya, isi keputusan fatwa.

BAB IV : Analisis Dalil-Dalil Syari'ah dan Metode Istimbat DSN-MUI Tentang Obligasi Syariah Ijarah.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula mengenai saran-saran, kemudian akhir dari pembahasan ini diakhiri dengan penutup.

BAB II

SUMBER DAN DALIL-DALIL HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN

Sumber dalam bahasa Arab adalah *mashdar* (مصدر) artinya "segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu". Dalam ushul fiqh kata *mashadir al ahkam al-syar'iyah* (مصادر الأدلا الشرعية) berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sedangkan *dalil* (الدليل), jamaknya *adillah* (الأدلة) yang berarti

الهادى إلى أي شيء حسى أو مصنوي خير أو شر

(Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu yang dirasakan atau yang dipahami baik sifatnya hal yang baik maupun yang tidak baik).

Adapun menurut istilah ushul, para ulama ushul mendefinisikan dalil hukum dengan:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن

Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat amali, baik secara qat'i maupun secara zhanni.¹

Dalil menurut arti ilmu ushul adalah

ما يمكن التوصل به بصحيح المظرفيه إلى مطلوب خبري

¹ Drs. Romli SA, M.Ag, *Muqaranah Mazahib Filushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hal. 41. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, untuk yang bersifat zhanni menurut sebagian ulama ushul fiqh, tidak dinamakan dalil, melainkan disebut imarah (indikasi/ tanda). Akan tetapi, mayoritas jumhur ulama ushul fiqh menyatakan bahwa petunjuk untuk mendapat hukum Islam yang bersifat praktis itu, baik yang bersifat zhanni maupun yang bersifat qat'i, disebut dengan dalil.

"Sesuatu yang dapat (mungkin) kita sampai dengan mempergunakan yang benar kepada sesuatu hasil yang bersifat khabar (hukum)".²

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa pengertian *dalil al-Hum* (دليل الحكم) atau *adillah al ahkam* (أدلة الأحكام) ini identik dengan *ushul al ahkam* (اصول الأحكام), yaitu sumber-sumber hukum, dan *mashadir al ahkam* (مصادر الأحكام), yaitu sumber-sumber hukum. Karenanya para ulama ushul fiqh adakalanya menggunakan istilah *adillah al-ahkam* untuk menunjukkan *mashadir al-ahkam* dan sebaliknya.

Akan tetapi dari pengertian bahasa, kedua pengertian itu sebenarnya terdapat perbedaan. *Mashdar* dalam pengertian bahasa adalah rujukan utama, atau tempat dikembalikannya segala sesuatu. Dalam pengertian bahasa Indonesia, sumber biasa diartikan sebagai "asal sesuatu", seperti sumber air adalah tempat memancarnya air yang sering disebut dengan mata air. Dalam pengertian ini, maka *mashadir al-ahkam* dalam Islam itu hanya Al-Qur'an dan *sunnah*. Para ulama ushul fiqh pun sebenarnya menyatakan bahwa hukum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah. Rosul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas hukum-hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu-Nya. Sekalipun terkadang rasulullah SAW menetapkan hukum tertentu melalui *sunnahnya* ketika wahyu tidak turun dari Allah. Akan tetapi ketetapan rasulullah SAW ini juga tidak terlepas dari bimbingan wahyu.

Oleh karena itu para ulama ushul fiqh kontemporer lebih cenderung memilih yang menjadi sumber utama hukum Islam (*mashadir ahkam al-*

² Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 159

syar'iiyyah) adalah Al-Qur'an dan sunnah. Karena Al-Qur'an dan sunnah disepakati seluruh ulama ushul fiqh sebagai sumber primer hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan pengertian dalil yang dikemukakan diatas Al-Qur'an dan sunnah juga disebut sebagai "dalil hukum". Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW disamping sebagai sumber hukum Islam, sekaligus sebagai dalil (alasan dalam penetapan hukum Islam).

Menurut para ulama ushul fiqh, baik klasik maupun kontemporer, ditemukan bahwa sumber atau dalil syara' itu selalu dikelompokkan kepada dua bagian dari segi disepakati atau tidaknya, yaitu: *adillah al ahkam al muttafaq 'alaiha/* (dalil-dalil hukum yang disepakati sebagai dalil) dan *adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha/* (dalil-dalil hukum yang diperselisihkan).

Adillah al-ahkam al muttafaq 'alaiha, menurut mereka terdiri atas Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha terdiri dari istihsan, istishhab, maslahah al mursalah, al-'urf, sadd al dzari'ah, madzab shahabi, dan syar'u man qablana.

Dalil yang menunjukkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas sebagai dalil/ sumber hukum Islam,³ ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan *ulil amri* (orang-orang yang memegang kekuasaan) diantara kamu kemudian jika

³ Drs. Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987, hal. 46-99

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rosul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁴

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Tujuan hukum Islam itu adalah:

1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier.
2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.⁵

B. SUMBER-SUMBER DALIL HUKUM ISLAM

1. Al-Qur'an

Secara etimologis, Al-Qur'an merupakan masdar dari kata kerja "قرأ" yang berarti bacaan atau yang tertulis.⁶ Secara terminologis (istilah) para ulama ushul fiqh diantaranya:

كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra

⁵ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H., *Asas-Asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal. 60-61

⁶ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 55

Kalam Allah mengandung mu'jizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.⁷

Dari definisi ini dapat disimpulkan ciri-ciri khas Al-Qur'an, adalah:⁸

1. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, maka tidak dinamakan Al-Qur'an, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab yang disebut terakhir ini adalah kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW, karenanya tidak dinamakan Al-Qur'an. Bukti bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah adalah kemu'jizatan yang dikandung Al-Qur'an itu sendiri, dari struktur bahasa isyarat-isyarat ilmiah yang dikandungnya, ramalan-ramalan masa depan yang diungkapkan Al-Qur'an.⁹
2. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab Quraishy. Oleh sebab itu, penafsiran dan terjemahan Al-Qur'an tidak dinamakan Al-Qur'an, tidak bernilai ibadah membacanya seperti nilai membaca Al-Qur'an dan tidak sah shalat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Qur'an, karena itu nama dan struktur bahasa dan makna yang dikandungnya.
3. Al-Qur'an itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (dituturkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai

⁷ *Ibid*, hal. 95

⁸ Drs. Zarkasji Abdul Salam, Drs. Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994, hal. 94-95

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 29-32

sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Berbeda dengan kitab-kitab samawi (yang datang dari Allah) lain yang ditujukan kepada para Rasul sebelum Muhammad SAW, sifatnya tidak mutawatir dan tidak dijamin keasliannya. Sedangkan Al-Qur'an terpelihara kemurniannya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Hijr, 15 : 9: Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

4. Membaca setiap kata dalam Al-Qur'an itu mendapat pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hafalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Qur'an. Sisi ini membuat perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadits, karena membaca hadits tidak dinilai sebagaimana penilaian terhadap membaca Al-Qur'an.
5. Ciri terakhir dari Al-Qur'an yang dianggap sebagai suatu kehati-hatian bagi para ulama untuk membedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab lainnya adalah bahwa Al-Qur'an itu dimulai dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Tata urutan surat yang terdapat dalam malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Dengan demikian, doa-doa yang biasanya ditambahkan diakhir Al-Qur'an, tidak termasuk Al-Qur'an.

Penjelasan Al-Qur'an Terhadap Hukum-Hukum

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjelaskan hukum-hukum yang

terkandung didalamnya. Ada dua cara Al-Qur'an memberikan penjelasan hukum adalah:¹⁰

1. Penjelasan rinci (juz'i) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah 'aqidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana hudud, dan kaffarat. Hukum-hukum rinci ini, menurut para ahli ushul fiqh, disebut sebagai hukum ta'abbudi yang tidak bisa dimasuki oleh logika.
2. Penjelasan Al-Qur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global (kuli), umum, dan mutlak, seperti dalam masalah shalat yang tidak dirinci berapa kali sehari dikerjakan, berapa ra'kaat untuk satu kali shalat, apa rukun dan syaratnya. Demikian juga masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakatkan, berapa nishab zakat, dan berapa kadar yang harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum dan mutlak ini, Rasulullah SAW, melalui sunnahnya bertugas menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan Al-Qur'an dalam surat Al-Nahl ayat 44 : Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

Hikmah yang terkandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum rinci yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an, adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan

¹⁰ Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *op.cit.*, hal. 18-181

kemajuan umat manusia ditempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh Al-Qur'an.

Persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan keterbatasan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat rinci dan global itu adalah, terjadinya pertentangan antara pernyataan Al-Qur'an sendiri yang menyebutkan sebagai syari'at yang telah sempurna (QS. Al-Maidah, 5 : 3, Al-Nahl, 16 : 89, dan QS. Al-An'am, 6 : 38) dengan kenyataan bahwa hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an, baik yang secara rinci maupun global dan umum.

Dalam hubungan ini para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum global dan umum dikandung Al-Qur'an tersebut telah memberikan kaidah-kaidah, kriteria-kriteria umum, dan dasar-dasar yang penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri, karena suatu Undang-Undang itu harus bersifat singkat, padat, tetapi juga fleksibel. Apabila Al-Qur'an menurunkan seluruh peraturannya secara rinci, maka menurut para ulama ushul fiqh, justru akan membuat Al-Qur'an itu bersifat terbatas dan tidak bisa mengayomi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah dan kriteria-kriteria umum yang diungkapkan Al-Qur'an menjadi penting artinya dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di segala tempat dan zaman.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kesempurnaan kandungan Al-Qur'an itu dapat dirangkum dalam tiga hal yaitu:

1. Teks-teks rinci (juz'i) yang dikandung Al-Qur'an
2. Teks-teks global (kuli) yang mengandung berbagai kaidah dan kriteria umum ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dalam hal ini Al-Qur'annya sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki syara', serta sejalan dengan kemaslahatan umat manusia di segala tempat dan zaman.
3. Memberikan peluang kepada sumber-sumber hukum Islam lainnya untuk menjawab persoalan kekinian melalui berbagai metode yang dikembangkan para ulama, seperti melalui sunnah Rosul, ijma', qiyas,

istihsan, mashlahah, istishan, 'urf dan zan'ah. Semua metode ini telah disyaratkan Al-Qur'an.

Dengan ketiga unsur ini, maka seluruh permasalahan hukum dapat dijawab dengan bertitik tolak kepada hukum rinci dan kaidah-kaidah umum Al-Qur'an itu sendiri. Disinilah, menurut ulama ushul fiqh, letak kesempurnaan Al-Qur'an bagi umat manusia Dalalah Al-Qur'an terhadap hukum-hukum nash-nash Al-Qur'an, seluruhnya bersifat qath'i (pasti) dari segi kehadirannya dan ketetapannya, dan periwayatannya dari Rasulullah SAW kepada kita. Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an adakalanya bersifat qath'i dan adakalanya bersifat zhanni (relatif benar).¹¹ Ayat yang bersifat qath'i adalah nash-nash yang menunjuk makna tertentu dan tidak mungkin menerima takwil, atau tidak ada pengertian lain selain makna tersebut,¹² sebagaimana firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ (النساء :

(12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak ... (QS. An-Nisa: 12)

Dalam memahami ayat tersebut, tidak ada pengertian lain atau alternatif lain bagi seorang suami bila ditinggal mati istrinya. Dengan demikian, semua nash yang hanya mempunyai satu pengertian dan tidak mungkin ditafsirkan dengan pengertian yang lain, maka nash tersebut qath'i hukumnya atau dengan kata lain, sudah pasti hukumnya.

¹¹ Abdul Wahhab al-Khalaf, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, Penerj. Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl Tafi, Drs. Ahmad Qarib, MA., Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 36-37

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 15

Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zhanni adalah nash-nash yang menunjuk makna yang mungkin menerima takwil, atau mungkin dipalingkan makna asalnya kepada makna yang lain. Dengan kata lain dapat juga dikatakan, bahwa nash tersebut mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran, seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة : 228)

Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci ... (QS. Al-Baqoroh: 228)

Lafal *quru'* didalam ayat tersebut dapat berarti kotor (haid) karena lafal *quru'* mempunyai dua pengertian, maka masa iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid, kenyataannya ada ulama yang mengatakan tiga kali haid, seperti Imam Syafi'i dan ada yang mengatakannya tiga kali haid, seperti Imam Hanafi. Kekuatan hukum kata-kata seperti ini, dalam hal ini kata *quru'*, menurut para ulama ushul fiqh bersifat zhanni (relatif benar). Oleh karena itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang mana yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain.

Al-Qur'an merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istimbath hukum harus mengacu kepada kaidah umum yang dikandung Al-Qur'an. Untuk memahami kandungan Al-Qur'an, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an (*asbab al-nuzul*), karena ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat ketika itu. Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya

ayat, akan membuat kerancuan dalam memahami hukum-hukum yang dikandung Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu turun sesuai dengan permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum.

2. As Sunnah

Pengertian

Secara terminologi, sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadits, ilmu fiqh, dan ushul fiqh. Sunnah menurut para ahli hadits identik dengan hadits, yaitu seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul.

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut para ahli fiqh, disamping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh diatas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.¹³

Pembagian Sunnah

Sunnah dipandang dari segi sanadnya (orang yang meriwayatkan) menurut jumhur ada 2 (dua) macam, ialah mutawatir dan ahad. Sedangkan menurut Hanafi, sunnah ada 3 (tiga) macam, yaitu: mutawatir, masyhur

¹³ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 67-68

dan ahad. Sunnah/ hadits mutawatir, adalah apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh orang banyak, yang menurut logika tidak mungkin mereka akan sepakat berdusta. Para penurut hadits (sanad) yang dinilai tidak bersepakat berdusta itu adalah para periwayat hadits pada tiga generasi, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in, karena setelah itu adalah masa pembukuan hadits, yang secara otomatis hadits-hadits Rasulullah tersebar luas keberbagai belahan dunia Islam sampai pada generasi-generasi sesudahnya hingga sekarang.

Sunnah hadits ahad, ialah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih, yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Kekuatan hukum hadits mutawatir, menurut kesepakatan para ulama adalah qath'i. adapun kekuatan hukum hadits ahad, apabila berstatus shahih, hanya bersifat zhanni. Hadits/ sunnah masyhur, ialah hadits yang pada generasi awal (sahabat) bersifat ahad, kemudian tersebar pada generasi sesudah sahabat secara mutawatir. Hadits masyhur itu berdiri sendiri antara Ahad dan Mutawatir, dan menurut hukum diperlukan seperti hadits Mutawatir, sehingga hadits masyhur itu bisa mentakhshish ayat yang mempunyai pengertian umum dan bisa juga taqyidul muthiaq (membatasi ayat Al-Qur'an yang belum ada batasannya).

Dalam masalah 'aqidah atau keyakinan, para ulama juga sepakat mengatakan bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan sebagai landasan,

karena masalah keyakinan harus ditetapkan dengan yang sifatnya mutawatir.¹⁴

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah: kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan ummat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau suatu kejadian.¹⁵

Ijma' dapat terwujud apabila terdapat unsur-unsur/ rukun:¹⁶

1. Adanya kesepakatan sejumlah mujtahid pada suatu masa tentang suatu peristiwa yang terjadi
2. Kesepakatan para mujtahid itu harus berasal dari semua tempat dan golongan
3. Kesepakatan para mujtahid itu harus nyata, baik dinyatakan dengan lisan maupun dapat dilihat dalam perbuatan.
4. Kesepakatan itu adalah kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid.

Pembagian Ijma'

Para ulama ushul membagi ijma' kepada dua macam dipandang dari cara mencapainya, yaitu:¹⁷

- a. Ijma' Sharih, ialah kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara' dan kesepakatan itu dinyatakan secara tegas oleh masing-masing mujtahid.

¹⁴ Drs. Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hal. 60

¹⁵ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 24

¹⁶ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 81

¹⁷ Drs. Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hal. 68

- b. Ijma' Sukuti, yaitu sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah, kemudian para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberi tanggapan apa-apa atas fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.

Menurut mazhab jumhur, ijma' yang bisa dipakai sebagai dalil pegangan hukum hanyalah ijma' sharih, karena terjadi ijma' yang sebenarnya. Berbeda dengan ijma' sukuti, yang bukan ijma' yang sebenarnya, karena sikap diam itu belum tentu menunjukkan setuju, sebab bisa jadi diamnya itu karena takut, segan, atau sinis terhadap fatwa/ keputusan hukum tersebut.

Ijma' dipandang dari segi dalalahnya (petunjuk) kepada hukum ada dua macam, ialah:

1. Qath'i dalalahnya atas hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk itu sudah dapat dipastikan benarnya, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan.
2. Dzanni dalalahnya atas hukumnya. Artinya hukum yang ditunjuk itu masih diduga keras benarnya.

4. Qiyas

Qiyas secara etimologi berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret, seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur, maupun yang abstrak, seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebagainya.

Qiyas menurut istilah ushul fiqh, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan sunnah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah itu.¹⁸

Menurut ulama ushul, qiyas harus berpijak kepada empat rukun, yaitu:

- a. Adanya pokok (الأصل), yaitu: persoalan yang telah disebutkan hukumnya didalam nash.
- b. Adanya al-far'u (الفرع) atau cabang, yaitu: suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas.
- c. Adanya hukum Ashl (المكم), yakni hukum syara' yang ada nashnya pada al-ashl (pokok)nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada ol-far'u (cabangnya).
- d. Adanya al-illat (العلة) ialah: suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (far'u), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hal. 74

¹⁹ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 103-104

5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa Arab, artinya menganggap sesuatu baik. Menurut istilah ushul fiqh, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali (nyata/ jelas illatnya) untuk mengamalkan tuntutan qiyas yang khafiy (samar illatnya), atau meninggalkan hukum yang bersifat umum untuk berpegangan dengan hukum pengecualian (istitsnaiy), karena ada dalil yang memperkuat sikapnya itu atau yang menyebabkan dia mencela akalanya dan memenangkan perpalingan ini.²⁰

Macam-macam istihsan

Dari definisi istihsan menurut syara', istihsan ada dua macam, yaitu:²¹

- a. Pentarjihan qiyas khafi (yang tersembunyi) atas qiyas jali (nyata) karena ada suatu dalil

Misalnya harta wakaf berdasarkan hadits, tidak boleh dijual belikan, dihibahkan, dan diwariskan. Tetapi jika harta wakaf itu sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan tujuan si waqif, maka dalam hal ini boleh dijual, lalu hasilnya dibelikan barang yang sejenis atau bukan sejenis yang bisa bermanfaat.

- b. Pengecualian kasuistis (juz'iyah) dari suatu hukum kuli (umum) dengan adanya suatu dalil.

Misalnya agama Islam melarang jual beli dan membuat akad sesuatu yang belum atau tidak ada pada waktu terjadi transaksi. Namun, agama

²⁰ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan*, Penerj. Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl Tafel, Drs. Ahmad Qarib, MA., Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 110

²¹ Drs. Masfuk Zuhdi, *op.cit.*, hal. 82

memberi dispensasi atas dasar istihsan dalam jual beli salam (barang belum ada pada waktu pembeli membayar harganya), juga dalam perburuhan, perkebunan/ pertanian, dan istihsna' (barang baru mau dibuatkan pada waktu akad). Semua akad ini, barangnya belum ada, tetapi dibolehkan agama atas dasar istihsan, karena masyarakat memang membutuhkannya.

Kedudukan istihsan sebagai dalil ataupun sumber hukum masih dipersoalkan. Kebanyakan ulama Hanafi memakai istihsan dengan alasan, bahwa istihsan itu tidak lain adalah menggunakan qiyas yang samar illatnya karena dipandang lebih baik, atau memilih suatu qiyas dan meninggalkan qiyas lain yang bertentangan, atau memakai masalah mursalah untuk mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum umum. Dan semuanya itu adalah menggunakan dalil yang benar.

Jelaslah, bahwa istihsan itu bukan dalil sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan qiyas yang samar illatnya atau berdasarkan masalah.

Dalam prakteknya, penggunaan istihsan sebagai dalil hukum memang menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima dan menolak.

a. Kelompok yang menerima istihsan sebagai dalil hukum

Kelompok yang berhujah dan menggunakan istihsan sebagai dalil hukum terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali (Hanabilah). Alasan mereka menjadikan istihsan sebagai

salah satu dalil hukum syara' dan merupakan hujah dalam istinbat hukum sebagai berikut:

1. Penggunaan istihsan sebagai hujah adalah karena berdasar penelitian terhadap berbagai kasus dan penetapan hukumnya (استقرأ الوقائع), yang ternyata berlawanan dengan ketentuan qiyas atau ketentuan kaidah umum, dimana kadang-kadang dalam penerapannya terhadap sebagian kasus tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus.
2. Kelompok ini menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dalam mempertahankan istihsan sebagai hujah. Diantaranya adalah:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Dan ikutilah dengan sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. (QS. Az-Zumar: 55)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

... Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185)

Dalam ayat yang pertama diatas diperintahkan mengikuti dan melaksanakan yang terbaik. Kemudian pada ayat kedua bahwa Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan bagi manusia, yang kesemuanya itu akan mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Menurut al-Sarakhsi, ayat-ayat diatas bagi mazhab Hanafi merupakan dasar bolehnya menggunakan istihsan dalam istinbat hukum.

3. Menggunakan dalil sunnah, sebagai berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد ابن حنبل)

Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam adalah juga baik disisi Allah.

b. Kelompok yang menolak istihsan sebagai dalil hukum

Tokoh yang populer menentang istihsan sebagai hujah dan dalil dalam istimbat hukum adalah Imam Syafi'i.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya syari'at berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah dan qiyas, bukan berdasarkan istihsan.
2. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu, memerintahkan agar mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan.
3. Selanjutnya syafi'i beralasan bahwa Nabi SAW tidak pernah menetapkan hukum dengan istihsan dan beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya saja.
4. Nabi SAW menolak para sahabat menggunakan istihsan yaitu ketetapan sahabat yang didasarkan pada apa yang mereka pandang baik.
5. Sesungguhnya istihsan itu tidak pasti dan tidak jelas serta tidak dapat dijadikan ukuran untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil sebagaimana layaknya qiyas.

6. Jika mujtahid dibolehkan menggunakan istihsan berarti ia tidak lagi berperang kepada nash, tetapi hanya berhujah pada akal semata.²²

6. Masalah Mursalah

Secara etimologis, kata " المصلحة ", jamaknya " المصالح " berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan " الخیر والصواب " yaitu yang baik dan benar.²³

Menurut istilah ushul fiqh masalahah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali didalam Al-Qur'an dan sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Untuk menggunakan masalahah mursalah ini, maka harus memperhatikan beberapa syarat, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. Masalahah mursalah itu hendaklah masalahah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
- c. Masalahah mursalah hendaklah maslahat yang bersifat umum/ maslahat yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.²⁵

²² Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 151-156

²³ *Ibid*, hal. 157

²⁴ Drs. Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, hal. 83

²⁵ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 165-166

7. 'Urf

'Urf adalah: sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. 'Urf disebut juga dengan adat kebiasaan. 'Urf menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat kebiasaan. 'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka.

'Urf dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. 'Urf yang shahih ialah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. 'Urf yang fasid adalah: sesuatu yang mudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁶

Adapun hukum 'Urf yang shahih, maka ia wajib untuk dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.

²⁶ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan*, Penterj. Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl Tafl, Drs. Ahmad Qarib, MA., Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 123

Hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya.

Setelah dibuktikan, sebenarnya 'Urf bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya 'Urf adalah termasuk dari memelihara masalah mursalah.²⁷

8. Istishhab

Istishhab menurut istilah ushul fiqh, ialah:

استبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي على ما كان واعتباره موجود مستمرا إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه أو يجعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم الدليل على تغييره.

"Meneruskan hukum yang telah berlaku dimasa yang lalu dan menganggapnya atau menghapuskannya, atau menjadikan hukum yang telah ada dimasa yang lalu tetap berlaku dimasa sekarang, hingga ada dalil yang mengubahnya".

Istishhab dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Istishhabul hukmil ashli lil asyya'*, yaitu meneruskan hukum asal untuk segala hal, sedangkan pada dasarnya segala yang bermanfaat bagi manusia itu boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukum lain.
- b. *Istishhabul 'adamil ashli* atau *al-baroah al-ashliyah*, artinya meneruskan tidak ada asalnya atau bebas, tak ada tanggungan asalnya.

²⁷ *Ibid*, hal. 124-126

- c. *Istishhabu ma dalla asy-syar'u 'ala tsubutih wa dawamih*, artinya: meneruskan eksistensi dan kontinuitas haknya atau tiadanya hak sesuai dengan petunjuk agama/ bukti yang ada.²⁸

9. Syari'at Orang Yang Sebelum Kita

Menurut sebagian ulama, hukum-hukum ilahi dari syari'at lama yang dikisahkan dalam Al-Qur'an atau hadits yang shahih tanpa disertai penjelasan berlakunya syari'at lama itu untuk kita, tidaklah berlaku untuk kita, karena syari'at kita itu membatalkan, mengubah atau menasakh syari'at-syari'at yang terdahulu.²⁹

10. Mazhab Sahabat

Apabila pendapat sahabat itu tidak ada yang menentanginya dari sesama sahabat, maka pendapat sahabat tersebut bisa dipakai hujah, sebab sikap diamnya sahabat itu dianggap *ijma sukuti*. Dan bila pendapat, sahabat itu merupakan hasil. Ijtihadnya, maka menurut *jumhur*, biasa dijadikan hujah, karena para sahabat itu dipandang lebih mampu memahami jiwa dan tujuan-tujuan syari'at Islam.³⁰

Pandangan Terhadap Fatwa Ulama

Tidak mungkin semua manusia diharuskan menjadi mujathid. Tidak mungkin pula ijtihad itu dijadikan fardlu 'ain atas segenap ummat Islam, karena yang demikian itu menyebabkan terbengkalai segala

²⁸ Drs. Romli SA, M.Ag, *op.cit.*, hal. 88-89

²⁹ *Ibid*, hal. 93

³⁰ *Ibid*, hal. 95

keperluan hidup yang lain. Oleh karena itu manusia dibagi kepada dua golongan:³¹

- a. Golongan yang mempunyai kemampuan memetik hukum atau menggali hukum dari dalil-dalilnya (golongan mujtahid)
- b. Golongan yang tak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dengan kekuatan ijtihadnya (golongan awam)

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama. Mereka meminta para ulama wajib memberi fatwa, tidak boleh mengharuskan orang menggali sendiri hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya. Apabila seseorang ammi tidak mengetahui sesuatu hukum, maka dia pergi bertanya kepada orang yang telah terkenal berilmu dalam masyarakat. Namun dia tidak boleh mengerjakan apa yang difatwakan oleh seseorang ulama terkecuali apabila hatinya pun puas menerima hulaimi itu dan tidak merasakan bahwa apa yang difatwakan itu berlawanan dengan yang seharusnya.

Kalau dia mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya berlawanan dengan fatwa itu tidaklah boleh dia mengikuti fatwa itu walaupun yang memberi fatwa orang yang dianggap paling alim, sebagaimana tidak memberi manfaat putusan hakim apabila diketahui bahwa keadaan yang sebenarnya berlawanan dengan putusan hakim itu.

Apabila hakim memenangkan seseorang, sedang orang yang dimenangkan itu mengetahui bahwa yang seharusnya menang, adalah

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Prof. DR., *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 166

lawannya, maka tidaklah halal dia memiliki benda yang diperolehnya dari kemenangan dalam perkara itu.

Syarat-Syarat Mufti

Menurut pendapat Imam Ahmad bahwa yang boleh menjadi mufti hanyalah orang yang memenuhi syarat, yaitu:

- a. Memberi fatwa, dengan niat mencari keadilan Allah semata. Karena itu jangan memberi fatwa karena untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan.
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan dan dapat menahan kemarahan. Karena ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa.
- c. Seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang kurang ilmu, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkin dia tidak berani mengemukakan kebenaran ditempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat tempat yang seharusnya dia diam.
- d. Seseorang yang mempunyai kecukupan, bukan seorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegakkan hidupnya.
- e. Mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila mufti tidak mengetahui keadaan masyarakat mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.³²

³² *Ibid*, hal. 167-168

Kewajiban-Kewajiban Para Mufti

Kewajiban-kewajiban itu antara lain:

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah atau dalam keadaan fikiran sedang bimbang dengan sesuatu hal. Karena hal itu menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.
- b. Hendaklah dia merasakan amat berhajat kepada pertolongan Allah dan hendaklah dia memohon pertolongan Allah agar menunjukinya kejalan yang harus ditempuh.
- c. Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridloi Allah. Dan dia harus memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsu.³³

Seorang mufti dalam memberi fatwa tidak boleh berpegang kepada pendapat seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya pendapatnya itu. Dia wajib berfatwa dengan yang lebih kuat dalilnya.

Mufti Yang Bertaqlid

Orang yang tidak mencapai derajat ijtihad tetapi dia mengetahui benar suatu mazhab yang telah berkembang dalam masyarakat, boleh memberi fatwa, kalau ditempatnya tidak ada yang ahli ijtihad dengan syarat dia mengetahui dan memahami dasar-dasar pegangan imam mazhabnya dan tahu pula cara-cara menerapkan dasar-dasar itu.

³³ *Ibid*, hal. 168-169

Mufti yang bertaqlid, sebenarnya bukan mufti, tetapi penukil fatwa imam yang dianutnya. Karena itu Mufti ini tidak dipandang ulama. Apabila dia memberi fatwa dengan pendapat seorang imam, dia wajib mengetahui benar bahwa itu pendapat imamnya, karena para ulama telah mengakui yang demikian.

Persamaan antara *vonis* (putusan hakim) dengan fatwa, adalah bahwa kedua keputusan itu diambil dengan mengetahui duduk kejadian serta didasarkan kepada hukum syara'.

Sedangkan perbedaannya, adalah:³⁴

- a. Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagian ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- b. Putusan hakim berlaku terhadap penggugat dan tergugat, kalau fatwa boleh diterima boleh tidak.
- c. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedang putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- d. Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Hakim wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan.

³⁴ *Ibid*, hal. 170-171

B. OBLIGASI

1. Pengertian Obligasi

Kata Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yakni obligatie, yang dalam bahasa Inggris disebut bond. Jadi yang dimaksud obligasi adalah pernyataan berutang kepada pemegang dan penyanggupi untuk membayar/mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu dengan sebagaimana yang disebutkan dalam surat utang itu.

Berdasarkan pasal 1 huruf a Kep. Menkue No. 7555/ KMK.011/ 1982, bahwa obligasi adalah jenis efek, berupa pengakuan utang atas peminjaman dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka panjang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan menyajikan imbalan bunga yang jumlahnya serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh amiten.³⁵

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa (obligasi as-sunnah) adalah surat pinjaman dari pemerintah yang dapat diperdagangkan dan dibayarkan dengan jalan undian tiap-tiap tahun.³⁶

Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution dalam bukunya yang berjudul Investasi pada pasar modal syariah, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/ perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Secara umum dapat juga diartikan obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh

³⁵ Try Widiyono, S.H., M.H., Sp.N., Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesian, Bogor, 2006, hal.29

³⁶ Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, PT, Ikhtiar Baru Van House, Jakarta, 1997, hal. 1248

suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai pari/ par valve) dan waktu jatuh tempo tertentu.³⁷

Sedangkan obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang. Obligasi syariah berupa bagi hasil / marjin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.³⁸

Obligasi syariah mempunyai pengertian sebagai berikut : Obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi pada tanggal pembayaran kembali dana obligasi syari'ah.³⁹

Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor dikalangan pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perusahaan. Perkembangan produk obligasi di Indonesia itu sendiri masih cukup lamban dibandingkan perkembangan produk saham. Perkembangan produk obligasi yang agak lamban tersebut salah satu kendalanya adalah kondisi pasar obligasi yang tersedia belum dioptimalkan oleh pelaku pasar modal, selain itu pemahaman perdagangan instrumen obligasi di kalangan masyarakat umum juga masih terbatas sekali.

³⁷ Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *Invertasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 81

³⁸ Lihat Fatwa DSN. MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004

³⁹ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hal. 141

Perkembangan obligasi menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai alat investasi dan instrumen keuangan pada periode tahun 2000. Adanya pengetahuan prosedur pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan utangnya mulai melirik instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif penggalangan dana.⁴⁰

2. Dasar Hukum Obligasi Syari'ah

Pelaksanaan obligasi syariah di Indonesia dilaksanakan atas dasar hukum :

1. Pendapat Ulama tentang keharaman mendapatkan bunga (interest).
2. Pendapat para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga.
3. Pendapat Ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah dan salam.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 DSN/IV/2001 mengenai pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 32/DSN-MUI/IX/2000 tentang Obligasi Syariah.⁴¹
6. Dalam kitab Buhuts fi al-iqtishad al-Islami karanga Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qarahdaghi, hal 352 – 353 disebutkan :

ويمكن كذلك اصدار صكوك للاجارة العادية (أي غير منتهية بالتملك)
سواء كانت اجارة الأعيان منقولة أو غير منقولة أم اجارة على الأعمال

⁴⁰ Ibid, hal 1-2

⁴¹ Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hal. 42

Artinya : Demikian pula dimungkinkan penerbitan obligasi ijarah biasa (bukan ijarah muntahiya bittamlik), baik ijarah atas nama barang (a'yan), bergerak maupun tidak bergerak, ataupun ijazah atas ijazah tenaga kerja.

7. Munzir Qahf, *Mu'ajalah al Ajz fi al Mizaniyyah al 'Ammah fi al Nizham al Islami*, hal 14 dan 16 :

ويمكن اصدار صكوك اجارة لقاء أصول ثابتة موجدة فعلا , يتم تمليكها الح ملي الصكوك , واستئجارها منهم كما يمكن صدورهما لقاء أصول ثابتة تقوم الحكم مة بشرائهما كالة عن حملة الصكوك , ثم استئجارها بعد ذلك منهم. (مندو قحف, معالجة العجز في الميزانية العامة في النظام الاسلامي ص : 41)

“Penerbitan shukuk (obligasi) ijarah dapat dilakukan terhadap (untuk) aktiva (asset) tetap yang telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih ke pemegang shukuk, dan (karena itu), penyewaan dilakukan dari mereka. Demikian juga shukuk ijarah dapat diterbitkan terhadap (untuk) aktiva tetap dimana pemerintah membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang shukuk, kemudian menyewanya dari mereka. Jika shukuk ijarah ditawarkan kepada publik untuk kepentingan taman umum yang belum ada (belum dibangun), maka pemerintah tidak dapat menggunakan dana terkumpul untuk selain pembangunan dana tersebut hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya.”⁴²

Dengan dasar pegangan hukum dari Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia mengenai obligasi syariah, penerbitan obligasi syariah oleh perusahaan di Indonesia bisa direalisasikan.

Dalam aturan ini diberikan pengertian mengenai dasar akad (perjanjian) yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah di antaranya :

- a. Mudharabah (muqaradah/qiradh)
- b. Musyarakah
- c. Murabahah
- d. Istishna
- e. Ijarah

⁴² Lihat Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004

Perusahaan yang akan menerbitkan obligasi syariah harus memenuhi ketentuan antara lain :

Bidang usaha yang dilakukan perusahaan, emiten (mudharib) tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan konsep syari'ah serta harus memperhatikan fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah.

Pendapatan (hasil) atau investasi yang dibagikan oleh perusahaan (penerbit obligasi) kepada pemegang obligasi syariah harus benar-benar halal serta tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.⁴³

Obligasi syariah sebagai bentuk pedoman (financing) dan sekaligus investasi (investmen) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindari pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan :

1. Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah/muqaradhah/qiradh atau musyarakah. Karena akad mudharabah/musyarakah adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapat yang dibagihasilkan.
2. Margin/fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istishna atau ijarah. Dengan akad murabahah/salam/istishna sebagai bentuk jual beli sebagai skema cost plus basis, obligasi jenis akan memberikan fixed return.⁴⁴

⁴³ Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hal. 142

Di Indonesia yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur mudharabah (bagi hasil pendapatan) dan ijarah baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

3. Pihak-pihak dalam transaksi Obligasi

Adapun pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi obligasi adalah :

- a. Emisi adalah suatu tindakan.
- b. Emiten adalah badan hukum yang mengadakan emisi atau bermaksud mengadakan emisi.
- c. Penjamin emisi (underwriter) Bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dan/atau lembaga lainnya yang melakukan kegiatan di bidang perantara yang menjamin atau menanggung penjualan obligasi.
- d. Trustee bank atau lembaga keuangan bukan bank atau badan / lembaga lainnya yang berkedudukan di Indonesia yang bertindak selaku badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi.
- e. Agen pembayaran yaitu suatu instansi yang diberi kuasa untuk membayar pokok obligasi beserta bunganya.
- f. Agen penawaran yaitu pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli obligasi.

⁴⁴ Nurul Huda, Mustofa Edwin Nasution, *investasi pada pasar modal syariah, rencana predana media group*, Jakarta, 200, hal 88

- g. Guratot adalah bank dan atau lembaga keuangan bukan bank yang menanggung pelunasan kembali pinjaman pokok obligasi beserta bunganya.⁴⁵

4. Keuntungan, Resiko dan Konsekuensi Penawaran Obligasi

- Keuntungan Penawaran umum
 1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak dengan termin-termin)
 2. Biaya relatif murah
 3. Proses relatif mudah
 4. Dengan adanya keterbukaan berarti juga mengharuskan adanya peningkatan dikenal masyarakat.
 5. Emiten akan lebih dikenal masyarakat.
 6. Obligasi merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun.
 7. Bisa menggunakan jasa penanggung (Guarantor) apabila Debt to Equity Ratio (DER) Emiten Tinggi.⁴⁶
- Resiko yang berhubungan dengan investasi dalam obligasi ada 2 resiko yang menyebabkan ketidakpastian mengenai pengembalian setelah sejumlah horizon investasi :
 1. Ketidak pastian mengenai harga dari obligasi pada akhir horizon investasi.

⁴⁵ Try Widiono, SH, Muhammad SAW., Sp. N. hal 250 - 251

⁴⁶ Djiptono Darmadji, Hendy M. Falahrudin, *Pasar Modal Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat. Jakarta, 2001, hal 43

2. Ketidakpastian mengenai suku bunga yang akan dipakai untuk menginvestasikan kembali dana dari penjualan obligasi sebelum jatuh tempo ke dalam obligasi lain hingga tanggal jatuh tempo.⁴⁷
- Resiko Investasi Obligasi :
 1. Resiko infensitas.
 2. Resiko tingkat suku bunga/interes rate risk.
 3. Resiko fluktuasi mata uang/currency risk
 4. Resiko utang / credit risk/pembayaran.
 5. Resiko volatilitas / volatilitas risk.
 6. Resiko likuidilitas /liquidity
 - Konsekuensi Penawaran Umum Obligasi :
 1. Harus menunjuk wali Amanat yang akan mewakili kepentingan pemegang obligasi.
 2. Menyisihkan dana pelunasan obligasi (sinking fund).
 3. Kewajiban manulasi pinjaman pokok dan bunga obligasi dalam waktu yang telah ditentukan oleh emiten dan wali amanat.
 4. Memberitahukan wali amanat setiap perubahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan emiten.⁴⁸
 - Karakter Obligasi Syariah :
 1. Obligasi syariah menekankan pendapatan infestasi bukan berdasar kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya,

⁴⁷ Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi, ibid, hal 47 - 53

⁴⁸ Djiptono Darmadji, op cit. hal 44

tetapi berdasarkan tingkat resiko bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.

2. Dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak Wali Amanat maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan Obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut.
 3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal.⁴⁹
- Manfaat penerbit Obligasi
1. Adanya alternatif sumber dana jangka panjang dan jangka menengah.
Sifat pedoman ini sangat fleksibel bagi perusahaan yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang murah dan keuntungannya pun cenderung lebih banyak menguntungkan dibanding utang jangka pendek.
 2. Nilai beban Cost of Capital (CoC) yang lebih murah
Mendapatkan dana dengan menerbitkan obligasi secara tidak langsung akan mendapatkan sumber pendanaan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber pendanaan dari utang bank yang biaya tingkat suku bunganya relatif lebih tinggi.
 3. Akses Pasar Modal
Dengan menerbitkan obligasi di pasar modal, secara langsung pihak perusahaan telah memberikan informasi internal perusahaan kepada

⁴⁹ Sapto Rahardjo, op. cit. hal 44

publik secara transparan. Hal ini akan memberikan kepercayaan positif bagi calon investor lainnya bahwa manajemen perusahaan tersebut telah melakukan koordinasi internal terhadap prosedur bisnis yang dimilikinya.

4. Proses Birokrasi yang fleksibel

Melakukan penerbitan obligasi mempunyai proses birokrasi administrasi yang lebih fleksibel dibandingkan melakukan pinjaman utang melalui perbankan.

Proses penerbitan sebuah obligasi mempunyai beberapa tahap prosedur yang harus dilewati setiap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi. Beberapa tahapan meliputi analisis kebutuhan dana yang dibutuhkan calon penerbit obligasi, proses pemeningkatan perusahaan, seleksi dan penunjukkan calon penjamin emisi (lead underwriter) studi kelayakan tentang kemampuan daya beli pasar investor terhadap obligasi tersebut, penyusunan struktur obligasi, persiapan dengan lembaga penunjang yang terkait, persiapan aplikasi permohonan penerbitan obligasi kepada pihak BAPEPAM (Badan Pelaksanaan Pasar Modal), Public Ekspose dan Due Diligence Meeting dengan calon investor. Sampai tahap penerbitan obligasi dan pembayaran dana atas pembelian obligasi serta terhadap settlement akhir.

Untuk mempersiapkan penerbitan obligasi, setiap perusahaan harus mampu melakukan konsolidasi terhadap beberapa tahap dan permasalahan internal yang meliputi :

- a. Menunjukkan lembaga penunjang dan profesi pasar modal sebagai pihak lembaga terkait yang menunjang kelancaran penerbitan obligasi. Pembicaraan yang dilakukan bisa berbentuk perintah tugas ataupun negoisasi biaya fee, mengatur jadwal kerja dan tugas penting lainnya.
- b. Due Dilligiance oleh pihak lead underwriter (penjamin emisi)
 Penunjukan penjamin emisi (lead underwriter) yang dilakukan oleh pihak perusahaan (penerbit obligasi) bendanya sudah melalui tahapan seleksi (beauty contest).
- c. Due Dilligiance oleh pihak lembaga penunjang dan profesi penunjang.
 Setelah mendapatkan surat mandat atau penunjukan tugas dari pihak perusahaan, beberapa pihak lembaga penunjang dan profesi pasar modal diharuskan melakukan due dilligiance ataupun surve. Tujuan penelitian dan pengamatan internal perusahaan adalah mengetahui kondisi sebenarnya dari isi perusahaan serta mampu memberikan pendapat yang jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja perusahaan.
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi.
 Dengan mengadakan rapat teknis, diharapkan hasil persiapan prosedur administrasi penerbitan obligasi bisa berjalan lancar.
- e. Penyusunan prospektus, persiapan dokumen yang diberikan kepada Bapepam.
 Isi prospektus tersebut meliputi informasi penawaran umum obligasi, penggunaan dana, pernyataan hutang, analisis manajemen perusahaan,

resiko usaha, keterangan tentang perseroan, ikhtisar keuangan, ekuitas, perpajakan, penjamin emisi obligasi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, pendapat segi hukum, pemeringkatan obligasi, dan informasi wali amanat.

f. Penunjukan Lembaga Pemeringkat (Pefindo atau Kasnic Credit Rating)

g. Permohonan Listing ke Bursa

Dalam pengajuan permohonan listing ini, diusahakan agar semua persyaratan yang diminta telah dilengkapi supaya tidak terjadi penundaan kerja.

h. Penyelesaian datail dan persetujuan dokumen pernyataan pendaftaran.

i. Pernyataan pendaftaran ke Bapepam

j. Due Diligence

k. Public expose

Tahapan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada calon investor dan kalangan public.

Prosedur Bapepam

Dalam melengkapi prosedur persyaratan dokumen kepada pihak Bapepam, ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan, yakni :

a. Penyerahan Pernyataan Pendaftaran

Surat pernyataan pendaftaran diserahkan kepada Bapepam dan semua persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi.

b. Kegiatan mini expose

Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang penerbit obligasi serta struktur tentang obligasi itu sendiri di hadapan tim evaluasi Bapepam.

c. Pengkajian kelengkapan dokumen

Waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji kelengkapan dokumen maksimum adalah 45 hari sejak penyerahan dokumen lengkap yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran.

d. Pernyataan Pendaftaran emisi dinyatakan efektif

Waktu yang dibutuhkan untuk pernyataan efektif adalah 45 hari sejak penyerahan dokumen lengkap tentang pernyataan pendaftaran. Selain itu surat pernyataan efektif paling lambat harus diterima 6 bulan sejak laporan keuangan diaudit.

Setelah mendapat pernyataan pendaftaran yang disetujui oleh Bapepam serta dianggap efektif, pihak penerbit obligasi bisa melakukan beberapa tahapan pengumpulan calon investor atau pembeli obligasi tersebut. Beberapa tahapan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penawaran oleh pihak penjamin emisi, anggota sindikasi dan agen penjual serta investor potensial.
- b. Konsolidasi kemampuan daya beli sindikasi.
- c. Pembentukan sindikasi
- d. Penjatahan obligasi kepada calon investor.
- e. Pembayaran dana dari investor
- f. Penyerahan obligasi kepada investor

g. Obligasi memasarkan di BES

Dalam memasarkan obligasi di pasar perdana, secara spesifik harus diperhatikan strategi pemasarannya. Dengan mengoptimalkan strategi pemasaran, diharapkan bahwa pihak lead underwriter dan penerbit akan mendapatkan hasil penjualan obligasi yang memuaskan.

Setelah menyelesaikan perjanjian emisi secara keseluruhan sampai berakhirnya pasar perdana, bagi pihak penerbit obligasi (emiten) ada kewajiban administrasi yang harus dilakukan selama umur obligasi sampai waktu jatuh tempo obligasi tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hal. 82 - 97

BAB III

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS INDONESIA

NO. 41/ DSN – MUI / III / 2004 TENTANG OBLIGASI SYARI'AH IJARAH

A. PROFIL DEWAN SYARI'AH NASIONAL

1. Kedudukan DSN

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syari'ah.¹ Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh persamaan dalam penangannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah.

DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep. Organisasi dan Keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Periode tahun 2000 – 2005, susunan pengurus baru Dewan Syari'ah Nasional MUI terdiri atas 34

¹ Prof. Dr. HM. Din Syamsudin, Drs. HM. Ichwan Sam, ect, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat*, Jakarta, 2001, hal. 163

orang (termasuk lima anggota dari unsur Badan Pelaksana Harian). Ketua dan Sekretaris di jabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Didampingi dengan tiga wakil Ketua dan dua wakil sekretaris. Adapun pelaksana tugas dan fungsinya sehari-hari dijalankan oleh Kelompok kerja/ Pokja yang beranggotakan 13 orang.

Dasar pemikiran dibentuknya DSN, sebagaimana disebutkan dalam pedomannya adalah :

- a. Dengan semakin berkembangnya Lembaga-Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah.
- b. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan.
- c. Dewan Syari'ah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syari'ah Nasional berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Tugas dan Wewenang DSN

Dewan Syari'ah Nasional mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun wewenang Dewan Syari'ah Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah dimasing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/ lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Mekanisme Kerja DSN

Dewan Syari'ah Nasional sebagai bagian dari Maklis Ulama Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mempunyai struktur yang terdiri dari DSN, Badan Pelaksana Harian, dan Dewan Pengawas Syari'ah. Adapun mekanisme adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Syari'ah Nasional, adalah badan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS. Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Dewan Syari'ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
 - Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
 - Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan telah/ tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah nasional.
- b. Badan Pelaksana Harian adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas-tugas DSN, tugas pokoknya adalah:

- Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syari'ah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
 - Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
 - Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/ usulan.
 - Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapatkan pengesahan.
 - Fatwa atau memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Nasional.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah, adalah badan yang di LKS untuk mengawasi pelaksanaan putusan DSN. Tugas pokoknya adalah:
- Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang berada dibawah pengawasannya.

- Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengajukan usul-usul pembangunan keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- Dewan Pengawas Syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syari'ah yang diawasinya kepada Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- Dewan Pengawas Syari'ah memutuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari'ah Nasional.²

Berdasarkan paparan diatas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan Perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat para ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk Al-Qur'an, Hadits, pendapat para Imam Mazhab, serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah

² *Ibid*, hal. 164-168

mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan kedalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat peraturan BI.

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan untuk menjaga obyektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN.

Sebaliknya DSN berdiri sendiri diluar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syari'ah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah.³

4. Program dan Pembiayaan DSN

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya, Februari 1999, telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan

wewenang yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia.

Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syari'ah dimasing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya tersebut, sejak tahun 2001 sampai sekarang (2008), DSN telah mengeluarkan sebanyak 53 fatwa untuk lembaga keuangan, keuangan syari'ah. Untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut, DSN telah menerbitkan beberapa edisi buku Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Terakhir adalah buku Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006, yang diterbitkan atas kerja sama DSN-MUI dan Bank Indonesia.

b. Mengeluarkan Surat-Surat Keputusan

DSN juga telah menetapkan beberapa keputusan/ ketentuan yang akan menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah SK yang telah dikeluarkan antara lain: SK tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) DSN, SK tentang petunjuk pelaksanaan

penetapan anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan SK tentang dana kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

c. Memberikan Rekomendasi Kepada LKS

DSN-MUI telah mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah. Hingga kini, sudah ada 13 rekomendasi DPS yang dikeluarkan DSN kepada LKS diluar BPR Syari'ah, yaitu kepada 6 bank syari'ah, 2 investasi syari'ah dan 4 asuransi syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional dana operasional dari bantuan pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat, disamping mendapat dana dari setiap Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada. Selanjutnya DSN mempertanggungjawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.⁴

B. ISI KEPUTUSAN FATWA

Berlandaskan atas dasar hukum pada firman Allah SWT., dalam QS. Al-Maidah (5) : 1, QS. Al-Baqarah (2) : 233, dan QS. Al-Qashash (28) : 26, serta hadits-hadits Nabi saw., antara lain :

- 1) Hadits Qudsi riwayat Muslim dari Hurairah
- 2) Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar
- 3) Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri
- 4) Hadits riwayat Abu Daud dari Sa'ad Ibn Abi Waqqash

⁴ *Ibid*, hal. 168

5) Hadits riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahhab al-Zuhaili). Serta pendapat-pendapat ulama dahulu, antara lain:

- a. Imam al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, hal.394
- b. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal.7
- c. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal.54
- d. Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, juz XV,hal.308; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz II, hal.332; al-Dimyathi, I'alah al-Thalibi, juz III,hal.108
- e. Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab,juz XV, hal.383
- f. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz VIII, hal. 56
- g. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz VIII, hal. 113
- h. Al-Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 3, Cet. Ke-4, hal. 208, dan masih banyak yang lain.

Keputusan DSN-MUI Tentang Fatwa Obligasi Syari'ah Ijarah

adalah :

***Pertama* : Ketentuan Umum**

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu'jir (pemberi sewa).
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
2. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi-Fatwa DSN-MUI nomor 20/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor

40/DSN MUI/X/2003 tentang, Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang, telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (a'yan) atau manfaat (manafi') dalam menyewakan (ijarah)-asset atau manfaat yang menjadi' haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (*'iwadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
8. Pengawasan aspek syariah dilakukan, oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama III, disepakati dalam akad.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN DALIL-DALIL SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG OBLIGASI SYARIAH IJAROH

A. ANALISIS PENERAPAN DALIL-DALIL SYARI'AH

1. ANALISIS PENERAPAN DALIL AL-QUR'AN

Ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak dikutip sebagai dasar fatwa DSN-MUI adalah:

QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu”

Ayat diatas berisi seruan bagi orang-orang yang beriman untuk menunaikan akad-akad (perjanjian) yang telah dibuatnya.

Kata akad yang berasal dari bahasa arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Istilah padanannya adalah perjanjian, kesepakatan, transaksi, kontrak, dan istilah-istilah lain yang sepadan. Akad merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dari bunyi ayat tersebut secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut.

Maka tidak salah jika DSN-MUI menukil ayat tersebut untuk dasar fatwa dalam transaksi bisnis dan transaksi keuangan syari'ah. Isi kesepakatan

itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

Tapi seharusnya DSN-MUI dalam membuat keputusan yang berdasarkan dalil (Al-Qur'an) seharusnya dikutip dengan selengkapnya/tidak seharusnya mereka menggunakan atau memotong ayat Al-Qur'an karena kalau hanya dengan sepotong ayat saja maka artinya pun/pengertiannya pun bisa berubah/lain.

QS. AL-Baqarah: 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini berisi hendaknya para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, tetapi bila kedua orang tua ingin menyapihnya (sebelum dua tahun) juga tidak berdosa tapi harus dengan kerelaan keduanya. Dan kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dan apabila keduanya (ayah dan ibu) ingin menyusukan anaknya pada orang lain, maka tidak ada dosa apabila kita memberi upah/pembayaran menurut yang patut.

QS. Al-Qashas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat diatas menyuruh kita agar selalu berlaku adil, jujur dan dapat dipercaya. Karena sikap-sikap itu juga yang menjadi dasar dalam setiap akad (perjanjian).

Ayat-ayat tersebut sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan transaksi obligasi syariah ijarah. Tetapi dalam akad-akad tersebut haruslah ditegakkan prinsip-prinsip dalam muamalah. Prinsip-prinsip muamalah yang harus ditegakkan menurut ayat-ayat diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Haruslah memenuhi janji jika telah dibuat suatu akad/perjanjian yang halal.
2. Harus menunaikan/melaksanakan kewajibannya.
3. Harus menunaikan amanat/memberikan hak orang yang berhak menerimanya.
4. harus saling mempercayai dalam melakukan perjanjian.
5. harus jujur dalam melakukan perjanjian.

Prinsip-prinsip lain yang juga harus ditegakkan, selain yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, misalnya prinsip: bekerja dengan sarana ibadah dan takwa, prinsip musyawarah, prinsip adalah (keadilan), prinsip musawah (persamaan), tidak ada spekulasi (gharar) dan sebagainya.

Menurut ulama ushul fiqh, sebenarnya tidak sah berdalil dengan dalil ‘am untuk perkara yang khusus. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam DSN MUI tersebut bukan sebagai dalil khusus, tetapi adalah prinsip-prinsip atau etika-etika yang harus ditegakkan dalam praktek ekonomi syari’ah, dan tidak hanya untuk obyek yang diberi fatwa.

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam memang adakalanya menjelaskan hukum-hukum secara rinci dan adakalanya secara global. Penjelasan rinci (juz’i) umumnya untuk hukum yang bersifat ta’abbudi, yaitu bidang aqidah dan ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh logika. Sedangkan selainnya yaitu dalam bidang muamalah ditunjukkan ayat-ayat yang global (kulli), umum (‘am), dan mutlak.

2. ANALISIS PENERAPAN DALIL AS-SUNNAH

1. Hadits Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي (اي حلف باسمي) ثم غدر, ورجل باع حرا فأكمل ثمنه, ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

Hadits ini memberi pelajaran tentang orang-orang yang mengingkari sumpahnya, orang-orang yang memakan (mengambil) keuntungan bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain, dan orang yang tidak mau memenuhi kewajibannya maka di hari kiamat Allah akan menganggap mereka adalah musuh. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

2. Hadits riwayat ibn Majah dari Ibnu Umar.

أعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه

Hadits yang berisi tentang apabila kita mempekerjakan seseorang maka kita harus sesegera mungkin memberikan upah/imbalan atas apa yang ia kerjakan/lakukan. Kita tidak boleh menunda-nunda/ menahan/ memberikan haknya kepada orang yang telah melakukan kewajibannya kepada kita.

3. Hadits riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri.

من استأجيرا فليعلمه أجره

Hadits di atas menjelaskan tentang jumlah bayaran upahnya harus jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi kericuhan pada waktu pekerjaan sudah selesai, baikpun ia kawan atau orang lain.¹ Oleh karena itu sebelum kita melakukan perjanjian kerja maka sebaiknya kita melakukan dulu berapa jumlah upah yang harus dibayarkan, sehingga tidak terjadi kerancuan atau perselisihan antara orang yang memberi kerja dengan orang yang diberi kerja/orang yang bekerja.

4. Hadits riwayat Abu Daud dari Sa'ad ibn Abi Waqqash.

كنا تكري الارض بما علي السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها, فتهانا رسول الله صلي الله عليه واله وسلم عن ذلك وأمرنا ان نكرها بذهب أو فضة

Hadits ini melarang kita supaya tidak menyewa tanah dengan bayaran/ upahhasil petanian. Tetapi kita diperintahkan dengan upah/ sewa

¹, *Bulughul Maram*, alih bahasa K.H. Kahar Masyhur Jilid I, Jakarta: 1992, hal. 156

dengan barang lain yang bukan merupakan hasil dari pertanian tersebut, bisa dengan emas, perak, uang atau barang lain yang sepadan nilainya dengan barang tersebut. Serta kita tidak boleh tukar-menukar barang/ jual beli dengan bayaran barang sama dengan yang dijual/ disewakan.

5. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Riwayat At-Tirmidzi ini hampir selalu dikutip sebagai dalil fatwa (37 fatwa), berisi prinsip umum dalam muamalah, yaitu tentang kebebasan membuat akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika kedua pihak sudah membuar syarat atau perjanjian, maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh para ulama muhadditsin, artinya sah dijadikan atau dalil hukum.

3. ANALISIS PENERAPAN DALIL IJMA’

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa adillah al-ahkam (dalil-dalil hukum) itu ada yang bersifat naqli dan ada yang bersifat aqli. Yang bersifat naqlia adalah Al-Qur'an, Sunnah. Sedangkan yang bersifat aqli adalah ijtihaad, baik ijtihaad itu bersifat fardi (pribadi mujahid tertentu) maupun ijtihaad yang bersifat jama'i (kolektif). Oleh sebab itu adillah al-ahkam menurutnya terbagi tiga, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihaad.

DSN-MUI dalam fatwanya selain menukil dalil-dalil naqli, juga menggunakan dalil aqli. Dalil aqli yang sering digunakan untuk memperkuat fatwanya adalah ijma', qiyas, dan kaidah-kaidah fiqih.

Dalam fatwa tentang obligasi syariah ijarah, DSN menukil riwayat dalam kitab wahhab zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Menurut penulis, penerapan dalil ijma' seperti sudah pas yang kaitannya dengan akad obligasi syariah ijarah yaitu akad sewa-menyewa. Karena ijma haruslah kesepakatan ulama sekarang karena peristiwanya terjadi sekarang. Jika tentang suatu peristiwa tidak ada yang menentang, maka telah terjadi ijma' sukuthi (ijma pasif). Misalnya tentang praktek obligasi syariah ijarah, ternyata ulama Indonesia tidak ada yang melarang. Maka hal ini telah terjadi ijma'.

Dalil-dalil yang relevan dengan fatwa-fatwa DSN adalah pertimbangan maslahat (kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum) dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Karena maslahat inilah tujuan syariah dan hukum. *Ainama wujudati al mashalatu fatsamma hukmullah*. (Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah). Perimbangan ada tidaknya maslahat ini harus dilakukan pengkajian yang cermat dan objektif oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Misalnya terdapat suatu kenyataan dimasyarakat yang tidak bisa dibantah, bahwa banyak orang yang mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama modal dan kerja antara kedua belah pihak tersebut.

4. ANALISIS PENERAPAN KAIDAH FIQH

Selain menukil ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi, dalam fatwa-fatwa DSN-MUI juga dikutip dari kaidah-kaidah fiqh. Kaidah fiqh yang digunakan di sini adalah:

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليلا علي تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

اينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”

Dalam menerapkan kaidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Katiga hal tersebut adalah: (1) Kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) Ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan. Dengan kata lain, meneliti tersebut; dan (3) memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-hatian.

Kehati-hatian dalam menggunakan kaidah ini diperlukan agar antara masalah yang akan dipecah dengan kaidah yang digunakan bisa tepat (pas). Sebab, antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah

fiqh yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya. Artinya, harus pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka.

Oleh karena itu, masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, yaitu: (1) Ruang lingkup yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, sinayah atau pengadilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut; (2) Apakah masalah yang dihadapi tersebut, substandinya perubahan hukum atau bukan; (3) Apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil; (4) Apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan al-qawa'id al-tafshiliyah atau dhabits atau muihaq-nya; dan (5) Hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fiqh dalam arti materi fiqh.

Setelah menggunakan kaidah fiqh diatas, menghasilkan suatu hukum ijtihadiyah atau hukum fiqh, mungkin haram, makruh, mubah, sunnah, atau wajib. Kemudian hasil tersebut diukur oleh dalil-dalil kulli, baik berupa Al-Qur'an, Hadits Nabi, semangat ajaran, atau kaidah-kaidah kuliyyah fiqhiyah (kaidah asasi). Selain itu, hasil tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam, seperti: keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ada maknanya bagi kehidupan (hikmah).

Apabila setelah diukur dari sisi kesesuaiannya dengan dalil-dalil kulli dan tidak bertentangan dengan dasar dan prinsip hukum Islam, maka masalah tersebut telah terselesaikan dengan hasil ijtihad yang kadar kebenarannya insya Allah cukup tinggi

2. Prinsip Pengecualian.

Dalam menerapkan kaidah fiqh harus memperhatikan masalah-masalah furu' atau materi-materi fiqh yang ada diluar kaidah fiqh yang digunakan. Hal ini penting karena setiap kaidah fiqh memiliki kekecualian-kekecualian yang tidak tercakup dalam ruang lingkup kaidah tertentu. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesalahan memasukkan masalah yang akan dijawab atau yang akan dipecahkan kedalam kaidah, yang sesungguhnya masalah tersebut merupakan kekecualian dari kaidah yang digunakan.

Makin luas ruang lingkup suatu kaidah, makin banyak masalah-masalah fiqh yang masuk dalam cakupannya. Dengan kata lain, makin luas ruang lingkup suatu kaidah makin sedikit kekecualiannya, sedangkan makin sempit ruang lingkup suatu kaidah makin banyak kekecualiannya.

Disinilah pentingnya membagi kaidah fiqh kedalam berbagai ruang lingkup secara berjenjang dari yang paling luas sampai kepada yang paling sempit.

Dengan adanya kaidah-kaidah fiqh dalam bidang hukum tertentu akan mempermudah kita dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Apabila masalahnya dibidang muamalah, maka cari dahulu kaidah-kaidah

fiqh dibidang tersebut, dan seterusnya. Apabila tidak ditemukan, maka ditelusuri kepada kaidah-kaidah yang lebih umum. Apabila tidak ditemukan juga, barangkali masih diperlukan memunculkan kaidah-kaidah baru karena belum tercover oleh kaidah-kaidah yang ada.

Langkah-langkah ini penting diambil untuk mengetahui kekecualian-kekecualian dari kaidah dan menghindari resiko kesalahan menggunakan kaidah yang terlalu besar untuk masalah yang ruang lingkupnya kecil. Atau sebaliknya, memaksakan untuk memasukkan kepada kaidah yang kecil untuk masalah yang ruang lingkupnya besar.

3. Prinsip kesinambungan.

Dalam penerapan kaidah fiqh perlu juga diperhatikan keseimbangan antara satu kaidah yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kaidah lain yang lebih luas ruang lingkupnya dan cakupannya. Hal ini memang tidak terlalu mudah, perlu menguasai keseluruhan kaidah fiqh dari mata rantai kaidah yang paling kecil sampai kepada yang paling besar dalam suatu sistem kaidah. Dengan demikian, kita akan tahu persis dimana letaknya kaidah fiqh dan ketepatan atau tidaknya kaidah tersebut dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam kaidah yang pertama, adalah termasuk kaidah yang khusus. Apabila kaidah tersebut dihubungkan dengan kaidah yang ruang lingkupnya lebih luas (kaidah fiqh yang umum), maka kaidah tersebut berhubungan dengan kaidah:

كل شرط مخالف اموال الشريعة باطل

“Setiap syarat yang menyalahi prinsip syariah adalah batal”.

Mungkin saja terjadi dalam penelusuran mata rantai kesinambungan ini ada salah satu mata rantai yang putus, maka di salah satu tugas dari para ahli untuk menggali dan menemukan mata rantai yang putus. Hal semacam ini adalah wajar di dunia ilmu dan diperlukan untuk pengembangan dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

5. ANALISIS PENERAPAN DALIL PENDAPAT PARA ULAMA

6. Imam al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, kitab al-Ijarah, hal. 394

Hal ini telah sesuai dengan obligasi syariah ijarah dan tidak melanggar norma-norma agama Islam/melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jadi DSN-MUI telah tepat dalam mengambil pendapat Imam al-Syairazi ini sebagai dalil yang dipakai dalam menentukan keputusan fatwa ini.

7. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 7

Dalam hal ini obyek dari obligasi syariah ijarah itu adalah diambil manfaatnya, jadi dalam inipun juga membolehkan jual beli atas manfaat, sehingga tidak ada salahnya bila DSN-MUI mnengambil dalil/pendapat ini untuk dijadikan hujjah/dalil hukum dalam menentukan keputusan fatwa mengenai obligasi syariah ijarah.

8. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 54

Dalil/ pendapat ini juga sudah sesuai atau pas bila digunakan sebagai dasar keputusan DSN-MUI mengenai obligasi syariah ijarah.

Karena memang benar bila kita/penyewa sudah menerima benda yang disewa maka ia boleh menyewakan benda tersebut dengan orang lain.

9. Imam an-Nawawi, al-Majmu Syarah al-Mahadzdzab juz XV, hal. 38; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz II, hal. 332, al-Dimyathi. I'ana al-Thalibin, juz III, hal. 108

Dalil ini sudah sesuai dengan pelaksanaan obligasi syariah ijarah karena memang tidak semua/setiap orang memiliki modal untuk pengembangan usahanya, kendaraan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu/membutuhkan bantuan orang lain dalam semua jenis usaha, karena jenis kebutuhan orang itu berbeda-beda sehingga kita tidak bisa untuk memenuhinya sendiri, kita mesti perlu bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan itu.

10. Imam an-Nawawi, al-Majmu Syarah al-Mahadzdzab juz XV, hal. 383;

Dalam pengambilan dalil pendapat ini tidak salah bila digunakan sebagai dasar/alasan diperbolehkannya transaksi dengan obligasi syariah ijarah karena dalam ijarah harus berupa manfaat, jadi boleh menyewakannya kembali sebelum bendanya diserahkan/diterima.

11. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 56

Dalam hal ini, penyewa boleh menyewakan benda yang disewanya dengan jumlah bayaran (sewa) yang sama atau lebih tinggi, sehingga sah sah saja bila kita menyewakan benda yang kita sewa dengan bayaran yang lebih tinggi dari sebelum kita menyewakan dari orang lain, asal tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan orang lain. Pendapat ini

sudah sesuai dengan penerapannya dalam keputusan fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah ijarah.

12. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 113

Benda yang disewakan adalah merupakan amanah ditangan penyewa, jika kerusakan bukan disebabkan karena kelalaian, maka penyewa tidak harus bertanggungjawab menggantinya. Pendapat ini sesuai dengan dasar dibolehkannya obligasi syariah ijarah, karena dalam obligasi syariah ijarah penyewa hanya meminjam bukan untuk memilikinya dan bayarannya pun dengan cara membayar harga sewa dari barang yang disewakan.

13. Al-Sayyid Sabiq dalam Fiqh a-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz 3, cet. Ke-4, hal. 208

Penyewa boleh menyewakan kembali barang sewaan, baik dengan harga lebih banyak, sama dengan harga pada saat ia menyewa atau bahkan lebih sedikit dari harga pada saat ia menyewa dulu. Hal ini juga tidak bertentangan dengan syarat Islam, jadi DSN-MUI tidak salah bila mengambil pendapat ini untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan fatwa mengenai obligasi syariah ijarah.

14. Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. 4, hal. 3842

Dalam hal barang sewaan yang dapat ditempati, misalnya rumah, toko atau tempat lainnya. Maka p0enyewa boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik ditempati diri sendiri ataupun dengan orang lain. Tetapi bila ditempati bersama-sama maka harus melalui akad sewa

menyewa atau dengan cara meminjamkan, penyewa juga boleh menaruh barang-barang milik orang lain didalam tempat itu. Asalkan tempat itu tidak dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam, misalnya tempat judi.

15. Dr. Ali Muhyiddin Ali al-Qarahdaghi, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, hal. 352-353

Dalam pendapat ini dibolehkan bertransaksi/penerbitan obligasi ijarah biasa, baik ijarah atas jasa tenaga kerja. Hal ini sah-sah saja dilakukan karena kita membutuhkan sedangkan pihak lain menyediakannya (yang kita butuhkan), jadi kita saling melengkapi satu sama lain.

16. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VIII, hal. 173

Pendapat ini membolehkan, jika salah satu dari dua orang berserikat atau mengadakan perjanjian membeli porsi bagian mitra serikatnya, karena ia membeli milik pihak lain, bukan miliknya sendiri. Jadi walaupun kita serekan bisnis tetapi kita boleh membeli kepunyaan rekan bisnis kita bila mereka menjualnya.

17. Al-Dimyathi, *I'alah al-Thalibin*, juz III, hal. 9

Pendapat ini tidak membolehkan seorang wakil pemegang OSI menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang yang ada dibawah pengampuannya, walaupun hal itu telah diizinkan dan telah ditentukan pula harganya. Hal ini kurang sesuai dengan hasil keputusan fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah ijarah. Dalam keputusan fatwa DSN-MUI

tentang obligasi syariah ijarah, emiter dalam kedudukannya sebagai wakil pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

18. Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 4, hal. 4094

Pendapat ini sama dengan pendapat al Dimyathi, yaitu tidak membolehkan wakil membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. tetapi menurut jumhur (mayoritas ulama) tidak membolehkan cara penjualan tersebut kecuali pihak yang mewakilkan mengizinkan penjualan kepada diri sendiri.

19. Munzir Qahf, *Mu'alajah al-‘Ajf fi al-Mizaniyyah al-‘Ammah fi al-Nizham al-Islami*, hal. 14 dan 16

Penerbitan Shukuk (obligasi) ijarah dapat dilakukan terhadap aktiva tetap yang telah ada. Kepemilikan aktiva tersebut beralih kepada pemegang shukuk, karena itu penyewaan dilakukan dari mereka. Shukuk ijarah dapat diterbitkan terhadap aktiva tetap dimana pemerintah membeli aktiva tersebut ditawarkan kepada publik untuk kepentingan taman umum yang belum dibangun sama sekali, maka pemerintah tidak dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk selain pembangunan taman tersebut. Karena pemerintah hanya dalam penggunaan dana tersebut hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya. Sehingga pemerintah tidak boleh memanfaatkannya dengan membangun selain taman sesuai dengan akadnya/perjanjiannya diawal.

Pendapat-pendapat para ulama diatas telah sesuai dengan syari'at Islam/ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak salah bila DSN-MUI mengambilnya sebagai dasar untuk menentukan fatwa tentang obligasi syariah ijarah.

B. Analisis Istidlal yang dipakai DSN-MUI dalam fatwa tentang obligasi syari'ah ijarah.

- 1) Dalam menentukan rukun dan syarat akad yang digunakan dalam obligasi syari'ah ijarah, DSN-MUI memakai dasar QS. An-Nisa' ayat 29 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian.

- 2) Obyek ijarah boleh berupa manfaat, DSN-MUI mengambil dasar dari pendapat Ibnu Qodamah, al-Mughni, juz VIII, hal.7

فهـي (الإجارة) بيع المنافع، و المنافع بمنزلة الأعيان

”Ijarah adalah jual beli manfaat, dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.”

- 3) Usaha yang dilakukan Emiten harus tidak bertentangan dengan syari’ah, ini sejalan dengan riwayat dari Abi bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda,

إن الله تعالى يحب أن ير ي عبده يسعى في طلب الحلال

“Sesungguhnya Allah sangat suka melihat hamba-Nya yang berusaha mencari rezeki halal.” (HR Thabrani dan Dailami)

- 4) Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan. Dalam hal ini DSN-MUI mengambil dasar berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282, serta riwayat Bukhari dan Muslim:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

“Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf (salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan.”

- 5) Pemegang OSI sebagai pemilik asset atau manfaat dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil. Dalam hal jual beli melalui wakil atau perantara adalah tidak masalah/dibolehkan, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah,

المسلمون علي شرو طهم

“Transaksi orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat antara mereka.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah). ”

- 6) dan 7) Dalam hal Emiten bertindak sebagai wakil dari pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan.

Ini berdasarkan atas Riwayat dari Abu Hurairah:

مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم علي مليء فليتبّع (رواه أبو داود وغيره)

“Penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendklah ia terima ihalah (pengalihan) tersebut.”

Dan berdasarkan

قول الرسول صلي الله عليه وسلم: "المسلمون عند شرو طهم

“Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang dipakai dalam fatwa DSN-MUI tentang obligasi syari'ah ijarah adalah (QS. Al-Maidah: 1) berisi seruan bagi orang-orang yang beriman untuk menunaikan janji-janjinya (akad), QS. Al-Baqarah: 233 berisi tentang pemberian timbal balik, artinya bila kita ingin menyusukan anak kita kepada orang lain maka hendaknya kita memberikan pembayaran menurut yang patut, QS. Al-Qashash: 26 berisi tentang sikap baik, jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, agar bila kita bekerja pada orang lain, kita bisa/dapat dipercaya juga.
2. Ayat tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan transaksi obligasi syari'ah ijarah. Ayat-ayat diatas bukan dalil khusus tetapi adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam praktek ekonomi syari'ah.
3. Riwayat-riwayat yang dijadikan dalil DSN-MUI memang tidak berkaitan langsung dengan obyek fatwa. Tanpa harus meneliti kualitas sanad dari riwayat-riwayat tersebut, apakah shahih atau dhaif, tetapi dari matan hadits tersebut dapat ditarik pemahaman tentang prinsip-prinsip umum dalam muamalah, yaitu tidak mengkhianati atas sumpahnya sendiri, mengambil milik orang lain, menunda-nunda membayar upah (HR.

Muslim dari Abu Hurairah), menyegerakan hak orang lain (HR. Abu Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri), dalam penyewaan tanah maka tidak boleh dengan bayaran hasil pertaniannya melainkan dengan emas atau perak (HR. Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash), membuat akad, kecuali untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal (HR. At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

4. Dalam fatwa tentang obligasi syari'ah ijarah, DSN-MUI mengambil riwayat dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhi. Menurut penulis, penerapn dalil ijma' seperti ini tdak tepat. Ijma' haruslah kesepakatan ulama sekarang. Kesepakatan ini bisa bersifat pasif. Jika suatu peristiwa tidak ada ulama yang menentang, maka telah terjadi ijma' sukuti (ijma' pasif). Misalnya tentang praktek jual beli obligasi syari'ah ijarah, ternyata ulama indonesia tidak ada yang melarang, maka ini telah terjadi ijma'.
5. Penerapan kaidah fiqh untuk fatwa obligasi syari'ah ijarh adalah sudah tepat, karena dalam kaidah fiqh tersebut berisi tentang kebolehan bermuamalah dalam bentuk apapun asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam fatwa DSN-MUI tentang obligasi syari'ah ijarah, tidak ad dalil yang mengharamkannya, sehingga obligasi syari'ah ijarah dibolehkan/ hukumnya boleh.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran sebagai berikut: sebaiknya ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits serta dalil-dalil ra'yu tersebut, harus dirumuskan kembali dan diolah menjadi pedoman yang praktis, karena dalil-dalil yang dinul\kil dalam fatwa hanya sebagai pajangan saja.

C. Penutup

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Karena taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat dengan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan harapan semoga Allah SWT. Menerima sebagai amal kebaikan dan memberi pahala dunia dan akhirat. Semoga skripsi ini dapat menambah wacana keilmuan yang ada dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca umumnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, Prof., H., S.H., *Asas-Asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, tt, edisi IV
- Ash-Shiddiqi, TM., Hasbi, Prof., Dr., *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT> Pustaka Rizki Putra, 1997
- Bakry, Nazar, Drs., H., *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet.1
- Darmadji, Djiptono, M. Falahruddin, Hendi, *Pasar Modal di Indonsia pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van House, 1997
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, Cet.3
- Dewi, Gemala, S.H., L.L.M., et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fabozzi, J. Frank, *Manajemen Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 1995
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab, Terj. *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl tafl, Drs. Ahmad Qarib, M.A., Semaang: Dina Utama, 1994
- Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Nasution, Mustofa Edwin, Huda, Nurul, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidan Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993

Alih bahasa K.H. Kahar Masyhur, Terj. *Bulighul Maram*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, jilid 1

Rahardjo, Sapto, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2003

Romli, Drs., SA., M.Ag., *Muqaranah Muzaib Filushul*, Jakarta: Gaya Media Pretama, 1999

Salm, Zarkasji Abdul, Drs., Fathurohman, Oman, Drs., Sw, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992

Suhendi, Hendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syahatah, Husein, Dr., Fayyadh, Athiyyah, Dr., *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal*, Terj., Alih Bahasa A. Syaukur, Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 2004

Symsudin, Din, Prof., HM., Drs., HM., Ichwansam, ect, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001

Widiyono, Try, S.H., M.H., Sp.N., *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, Cet. 1

Wiranegara, S., *Ekonomi dan Keuangan : Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gita Karya, 1988

Zuhdi, Masjfuk, Drs., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: CV. Hajimasagung, 1987